

## BAB V

### KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan skripsi yang berjudul *MILITER DAN POLITIK DI INDONESIA (Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998)*. Kesimpulan tersebut merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis di dalam bab sebelumnya. Terdapat empat hal yang penulis simpulkan berdasarkan permasalahan yang dibahas, yaitu:

*Pertama*, kebijakan Dwifungsi ABRI yang diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto berawal dari sebuah gagasan yang berasal dari A. H. Nasution, yang disebut sebagai konsep jalan tengah. Konsep jalan tengah tersebut merupakan sebuah konsep yang menginginkan militer bukan hanya berperan sebagai alat pertahanan keamanan negara, melainkan militer juga harus mampu menjalankan fungsi sosial-politiknya untuk ikut dalam menentukan arah kebijakan politik negara. Konsep Dwifungsi ABRI ini mempunyai akar dan latar belakang sejarah yang panjang sejak berdirinya organisasi ketentaraan di Republik Indonesia. Para perwira militer merasa mempunyai hak yang sama dengan kaum sipil dalam menentukan kebijakan dan jalannya pembinaan negara. Perkembangan dan perluasan peran dari konsep Dwifungsi mulai dirumuskan oleh kalangan internal militer dan melahirkan

doktrin Tri Ubaya Cakti dan dipertegas dengan adanya doktrin perjuangan Catur

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Dharma Eka Karma yang nantinya ikut mengembangkan dan memperluas konsep Dwifungsi ABRI itu sendiri.

Setelah terpilihnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia melalui TAP MPRS No. XLIV/MPRS/1968, secara perlahan militer mulai masuk ke dalam ranah sipil dan secara berangsur-angsur mulai menjalankan fungsi sosial-politiknya, dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 20 tahun 1982, maka landasan hukum dwifungsi ABRI pun menjadi lengkap. Pada pertengahan tahun 1970 sampai 1980-an, karena semakin kuatnya pengaruh pendekatan militer di dalam kehidupan sosial, menyebabkan dinamika serta aspirasi masyarakat kurang tersalurkan dengan baik. Karena pada saat itu jika ada yang berbeda dengan arus dominan dalam pemerintah, ia akan dianggap sebagai anti pembangunan. Bahkan pada tahun 1990-an mulai terjadi beberapa gejolak politik dari daerah-daerah. Bentuk pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kestabilan pemerintahan Soeharto. Melalui kebijakan dwifungsi ABRI yang dikeluarkan oleh Soeharto, maka militerlah yang digunakan untuk menjaga kedudukannya dari berbagai ancaman.

Pada perkembangannya, kebijakan Dwifungsi ABRI dalam derajat tertentu dapat dianggap sebagai pembenaran bagi pemerintahan Soeharto untuk mengangkat sejumlah besar anggota militer di MPR, DPR, serta menempati jabatan-jabatan eksekutif, baik itu di tingkatan nasional maupun daerah yang sangat strategis. Selain itu, militer juga ikut masuk dalam perusahaan-perusahaan milik negara yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Fungsi militer dalam politik ini dijadikan

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

sebagai kekuatan dan alat penopang kekuasaan Soeharto. Pada masa pemerintahan inilah yang menjadi sejarah dari puncak keterlibatan militer dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Walaupun pada perjalanannya, fungsi sosial politik ABRI ini mengalami pasang surut seiring dengan dinamika dan konstelasi politik yang berkembang di Indonesia pada saat itu.

*Kedua*, proses pelaksanaan kebijakan Dwifungsi ABRI ini tidak akan terlepas dari adanya tanggapan dari berbagai pihak. Secara umum, pelaksanaan dwifungsi ABRI dimaksudkan untuk membentuk profesionalisme dalam tubuh militer, dimana militer bukan hanya bertindak sebagai alat pertahanan keamanan negara saja melainkan juga harus mampu melakukan tugas serta peran lainnya di bidang non-hankam. Namun pada proses pelaksanaannya, kebijakan dwifungsi ini mengalami perluasan peran yang digunakan oleh Soeharto sebagai penguasa pada saat itu untuk ikut menopang kekuasaannya serta mengamankan kekuasaannya dari gangguan apapun. Perluasan peran ABRI ini menyebabkan dominasi militer dalam politik dan birokrasi pada masa pemerintahan Soeharto. Dominasi itu terjadi dari segi kuantitatif dan kualitatif yang bersifat strategis. Terjadinya dominasi militer dalam birokrasi adalah salah satu implikasi bentuk pemberlakuan kebijakan dwifungsi ABRI yang berdampak pada kehidupan sosial politik di Indonesia, khususnya terhadap tumbuhnya demokrasi yang sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia yang sejak awal kemerdekaan memiliki cita-cita terbentuknya negara demokrasi yang berdasarkan kepada UUD 1945 dan Pancasila.

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Berdasarkan implikasi yang terjadi pada saat itu, tanggapan mengenai kebijakan Dwifungsi ABRI memunculkan adanya anggapan negatif di masyarakat, seperti stabilitas menjadi tujuan, dinamika masyarakat menjadi terhambat, aspirasi akan pluralitas dikalahkan oleh keseragaman dan monoloyalitas, sementara desentralisasi melemah bersama menguatnya sentralisasi, sehingga demokrasi sulit tercapai karena adanya pelembagaan otoritarisme.

*Ketiga*, pengaruh kebijakan Dwifungsi ABRI pada bidang pertahanan keamanan pada masa pemerintahan Soeharto ini lebih menggunakan militer sebagai alat keamanan yang bertugas untuk meminimalisir segala bentuk ancaman yang timbul dan mengancam stabilitas negara serta kekuasaan Soeharto. Pada saat itu, peran ABRI sebagai alat pertahanan dan keamanan seakan di nomor duakan setelah fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik yang dianggap lebih penting. Namun, keterlibatan ABRI dalam kehidupan sosial politik yang semakin mendalam pada bidang-bidang sosial politik yang luas telah menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Militer seolah terjebak menjadi alat kekuasaan yang senantiasa melakukan pembenaran atas setiap kebijakan pemerintah.

Selain itu, dengan adanya berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat, mengharuskan masyarakat berhadapan dengan pemerintah dan juga militer yang senantiasa melibatkan diri di dalamnya. Pendekatan dalam penanganan berbagai konflik tersebut mengakibatkan militer cenderung melakukan tindakan yang represif,

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

konflik yang terjadi itu merupakan gambaran umum dari pengaruh kebijakan Dwifungsi ABRI pada kehidupan sosial, budaya dan politik yang ada di masyarakat.

Perluasan peran serta fungsi ABRI pada masa pemerintahan Soeharto merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan kebijakan Dwifungsi ABRI yang menyimpang. Pengaruh peran ABRI yang cukup besar dalam bidang sosial politik sangat terlihat dalam parlemen dan kabinet serta para pemimpin daerah yang berasal dari kalangan militer. Posisi ABRI yang menjadi mayoritas di parlemen pun mau tidak mau ikut mempengaruhi dari setiap kebijakan yang dihasilkan. Secara tidak langsung, Soeharto mengendalikan lembaga legislatif ini melalui anggota-anggota ABRI yang duduk di parlemen, sehingga makin memperkokoh kedudukan dan posisi militer dalam bidang sosial politik di Indonesia, baik itu dalam bidang sosial politik secara umum maupun dalam bidang non-hankam lainnya seperti bidang budaya dan ekonomi.

Dominannya peran dan posisi ABRI dalam pemerintahan mempunyai dampak yang sangat luas, bahkan merambah pada sektor yang vital seperti budaya dan ekonomi. Peran militer menjadi terlalu ikut campur dalam permasalahan budaya ketika pemerintahan Soeharto menggunakan militer sebagai alat kontrol sosial kemasyarakatan untuk menekan adanya gejolak-gejolak sosial yang mengancam kestabilan pemerintahan. Sedangkan untuk urusan ekonomi, militer mempunyai posisi yang strategis dan ditempatkan di berbagai perusahaan milik pemerintah sebagai penopang perekonomian militer dan nasional pada saat itu. Namun, posisi

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



dan peran militer yang seperti itulah yang memicu sikap masyarakat untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan perpolitikan yang terjadi di Indonesia.

Puncaknya terjadi pada Mei 1998, ketika pewacanaan “Reformasi” di segala sektor mulai diperjuangkan masyarakat. Setelah masyarakat jenuh dengan sikap dan otoritas Soeharto yang terlalu berlebihan, masyarakat menginginkan Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Sebenarnya sikap militer pada saat itu sudah mulai terbuka dan menyadari apa yang diinginkan masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan setelah pemerintahan Soeharto runtuh, maka banyak pendapat yang menuntut untuk diadakannya reorientasi yang bersifat mendasar dan struktural di setiap sistem yang ada, tidak terkecuali untuk militer khususnya dalam hal implementasi dan kebijakan dari Dwifungsi ABRI.

Setelah Soeharto turun dari jabatan Presiden, maka munculah era pemerintahan baru dibawah kepemimpinan Habibie yang menggaungkan jargon “Reformasi”. Selanjutnya Habibie membentuk Kabinet Reformasi untuk membantu membuat gagasan-gagasan dan menjalankan agenda reformasi di segala bidang, salah satu gagasan yang muncul adalah wacana mengenai “Reformasi Internal Militer”. Proses reformasi internal ini merupakan salah satu jawaban pemerintah terhadap tuntutan reformasi yang meneyeluruh di segala bidang. Menurut beberapa perwira tinggi, reformasi internal ini dijalankan bukan karena desakan masyarakat semata, tetapi juga karena kesadaran mereka dalam merespons perubahan yang sedang berlangsung. Kalangan militer merasa tidak terpaksa melakukan reformasi internal,

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

karena sejak awal 1990-an telah dimulai berbagai kajian tentang perubahan di lingkungan internal militer yang melahirkan paradigma baru ABRI.

Paradigma tersebut intinya berisi mengenai reposisi peran militer, perubahan syarat-syarat menduduki posisi politik, tidak melakukan intervensi politik dan menjalin kemitraan dengan masyarakat sipil. Secara normatif, wacana reformasi ini mendorong militer melakukan perubahan paradigma, peran, fungsi dan tugasnya. Wacana tersebut diharapkan mampu menjadi paradigma baru untuk membenahi internal organisasi militer dan mengamandemen kebijakan Dwifungsi ABRI ini sebagai jawaban terhadap situasi dan kondisi yang ada di Indonesia pada saat itu.

Pemerintah benar-benar merealisasikan wacana tersebut pada saat Abdurahman Wahid (Gus Dur) menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Habibie, selanjutnya, upaya merealisasikan wacana mengenai pembenahan fungsi dan peran militer pun dilanjutkan oleh Megawati ketika menjabat sebagai Presiden yang menggantikan Gus Dur. Sejak era pemerintahan Gus Dur sampai Megawati, upaya penghapusan hak-hak istimewa ABRI selama era pemerintahan Soeharto diwujudkan melalui beberapa kebijakan dan peraturan yang meliputi pengaturan tentang pemisahan TNI dan POLRI (Tap MPR No. VI/2000), pengaturan tentang peran TNI dan Peran POLRI (Tap MPR No. VIII/2000), Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pada dasarnya kebijakan Dwifungsi ABRI yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki manfaat yang baik untuk individu ABRI khususnya

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dan untuk pemerintah pada umumnya, namun hal itu menjadi salah ketika individu-individu ABRI memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingannya pribadi dan golongannya. Semestinya ABRI memberikan contoh sikap dalam berpolitik, karena pada hakikatnya militer itu mempunyai peran dan fungsi sebagai alat pertahanan keamanan negara yang mempunyai posisi netral dalam berpolitik. Dengan diamandemennya kebijakan Dwifungsi ABRI ini maka membuat pihak militer harus menentukan sikapnya, masuk ke dalam ranah politik tapi harus melepaskan jabatan militernya/pensiun atau tetap berkarir dalam institusinya tanpa ikut campur dalam urusan politik negara.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di negeri ini, khususnya dalam masalah militer membuat penulis memberikan rekomendasi untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan di bidang militer, seperti pembahasan peran dan fungsi militer setelah Reformasi Internal, pembahasan mengenai kegiatan militer di bidang Ekonomi dan meneliti mengenai para perwira militer yang terjun ke dalam partai-partai politik di Indonesia. Rekomendasi tersebut diharapkan bermanfaat dan bisa menjadi pelengkap materi kajian sejarah di Indonesia, khususnya di bidang sejarah politik dan militer.

**Dede Wahyu Firdaus, 2012**

**Militer Dan Politik Di Indonesia**

: Studi Tentang Kebijakan Dwifungsi ABRI Terhadap Peran-peran Militer di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu